

# ANALISA YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 384/PID.B/2008/PN.GRESIK DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Penerapan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Gresik)

---

 Oleh: YANI HARTANTO ( 03400025 )

Law

Dibuat: 2009-07-24 , dengan 2 file(s).

**Keywords:** Perkosaan Anak Dibawah Umur

## ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan anak dibawah umur merupakan tindak pidana yang sering terjadi disekitar kita. Banyaknya berita yang kita dengar dari media elektronik maupun media cetak tentang perkosaan anak dibawah umur merupakan kenyataan bahwa begitu rentanya posisi anak, dalam hal ini anak perempuan dibawah umur sebagai korban perkosaan. Secara fisik maupun psikis posisi anak begitu rapuh dari segala ancaman kekerasan maupun bujuk rayu sehingga dengan mudah mejadi korban tindak pidana perkosaan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku perkosaan anak di bawah umur.

Peneletian ini mengambil rumusan masalah : (1) Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus perkosaan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Gresik? (2) Bagaimana penerapan pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Gresik?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tehnik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan Hakim yang mengadili perkara nomor 384/Pid.B/2008/PN.Gresik dan dokumentasi catatan-catatan atau dokumen-dokumen penting misalnya berkas-berkas perkara, tabel-tabel jumlah kasus, dan lain-lain yang di peroleh di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Gresik sebagai tempat pengambilan data primer. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Dari 4 (empat) kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diajukan ke muka Pengadilan Negeri Gresik selama Januari hingga November 2008 berdasarkan jenis tindak pidana perkosaan adalah 1(satu) kasus dengan Terdakwa Kusnadi dan korban Siti Indari. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 293 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dalam putusanya Nomor 384/Pid.B/2008/PN.Gresik memutus dengan dasar hukum dan pertimbangan sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 293 ayat (1) KUHP meskipun Undang-undang yang lebih bersifat khusus telah di-undangkan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Mengenai putusan yang dijatuhkan majelis hakim, perlu di ketahui bahwa berdasarkan pasal Pasal 182 ayat (4) kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbanganya, hakim wajib mendasarkan pada surat dakwaan

serta apa yang telah terbukti dalam pemeriksaan pengadilan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat di simpulkan bahwa dalam putusannya majelis hakim menggunakan pasal 293 ayat (2) KUHP meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diberlakukan. Seharusnya berdasarkan asas “Lex Specialis Derogat Legi Generalis” maka pasal yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim harus berdasarkan ketentuan pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada ahir penulisan hukum ini, ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu yang pertama dalam memutus perkara pidana perkosaan terhadap anak perempuan dibawah umur, seharusnya aparat penegak hukum menggunakan asas “Lex Specialis Derogat legi Generalis”, Hendaknya dalam memutus setiap kasus tersebut dalam penulisan ini, Hakim Pengadilan Negeri Gresik menggunakan pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan mengesampingkan pasal 293 ayat (1) KUHP, Kedua Dalam menyelesaikan setiap perkara, seharusnya selalu ada koordinasi diantara aparat penegak hukum,

## ABSTRACT

Violation criminal act at children under age is a criminal act which is rapidly happen around us. Most at news that we heard from electronic media or printing media about violation at children under age is a reality that how susceptible the children position is too delicate from all at the threatening compulsion or delusion until become a victim at violence criminal act easily. By the accurse at laws number 23 years 2002 about children protection, hopefully can give intimidated attach to the doer at violation under age.

This research formulate statements at the problem that are: (1) how is the foundation at law and judge’s consideration in deciding violation under age case is Gresik District Court? (2) How is the implication of chapter 81 laws number 23 years 2002 about children protection in Gresik district court?

The methodology that is used in this research is juridical normative. The technique at collecting the data is interview with a judge who justice case number 384/Pid.B/2008/PN.Gresik and notes documentation or important documents like bundles at case, number at table cases, and others which is gain in the field that is in Gresik District Court as a place to get the data then the data that has gotten is analyzed with descriptive qualitative way.

From the 4 (four) sexual criminal act case that is brought to Gresik District Court for January up to November 2008 based on the kind of violation criminal act is 1 (one) case white accused Kusnadi and the victim is Siti Indari. In assembly of public prosecutor prosecute the accused legally and surely had runner against chapter 293 verse 1 panel code at law (KUHP). Than judge at Gresik district court in his decision number 384/Pid.B/2008/PN.Gresik decided with what wrote in accusation letter and prosecution letter of public prosecutor of law. By the end council argues that accused has proved legally and surely had runner against chapter 293 verse 1 KUHP even though the laws that is more specific have proclaimed that is laws number 23 year 2002 about children protection.

About decision that is given by council, it is important to know that based on chapter 182 verses 4 KUHAP decided that what a foundation of law and the consideration become. The judge must be founding on the accusation letter and what have proved in the law court investigation.

From the research and discussion ending, we can conclude that in this decision, the council uses chapter 293 verse 1 KUHP even thought laws number 23 year 2002 about children protection have applied. It should based on principle “lex specialis derogate legi generalis” therefore the

chapter which is demanded by the public prosecutor and than to be based on appointment with chapter 81 laws number 23 year 2002 about children protection.

In the end of laws writing, there are some suggestion that is delivered by the writer. The first is in taking decision of violation criminal act to the daughter under age, law endorsement apparatus should use principle "lex specialis derogate legi generalis" in decide every case above. The judge at Gresik district court should use chapter 81 laws number 23 year 2002 about children protection. An cost aside chapter 293 verse 1 penal code of law (KUHP). The second is in finishing every case it should always there is coordination between law enforcement apparatus.